

**PERANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DI PASAR
PARGARUTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

**ALI WARDANI
NIM. 1940200203**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DI PASAR
PARGARUTAN KABUPATEN TAPANULISELATAN**



SKIRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ALI WARDANI
NIM. 1940200203**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DI PASAR
PARGARUTAN KABUPATEN
TAPANULISELATAN**



SKIRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

**Oleh:
ALI WARDANI
NIM. 1940200203**

PEMBIMBING I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1004**

PEMBIMBING II


**Try Wahyu Uami, M.M
NIDN. 2021059002**

*19/5-25
Kec -*

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n ALI WARDANI

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 03 Juni 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

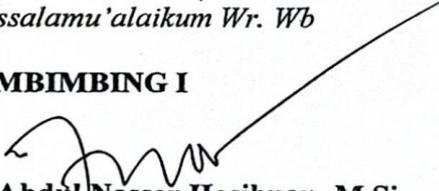
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ALI WARDANI yang berjudul "**Peranan Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

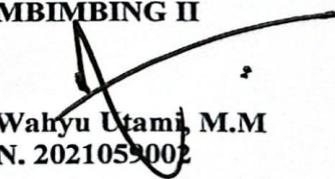
Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIDN. 2025057902

PEMBIMBING II


Try Wahyu Utami, M.M
NIDN. 2021059002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALI WARDANI
NIM : 1940200203
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2025
Saya yang Menyatakan,



ALI WARDANI
NIM .1940200203

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Wardani
NIM : 1940200203
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peranan Dinas Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan ”**

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2025

Yang menyatakan,



Ali wardani
NIM. 1940200203



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: www.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ali Wardani
NIM : 1940200203
Program Studi : Ekonomi Syariah Fakultas
: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha di
Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Sry Lestari, M.E.I.
NIDN. .2005058902

Sekretaris

Nofinawati, M.A
NIDN.2016118202

Sry Lestari, M.E.I.
NIDN.2005058902

Anggota

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Try Wahyu Utami, M.M.
NIDN.2021059002

M. Fauzan, M.E.I.
NIDN. 0104048904

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 17 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,5 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,00
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM**
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DI
PASAR PARGARUTAN KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

NAMA : **ALI WARDANI**
NIM : **1940200203**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025



Dekan
Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : ALI WARDANI
NIM : 1940200203
**Judul : PERANAN DINAS PASAR DALAM PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA DI PASAR PARGARUTAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Pasar dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pasar dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Melalui berbagai program yang dilaksanakan, seperti pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan promosi produk lokal. Program-program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Meskipun peran Dinas Pasar sangat penting, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas program-program pemberdayaan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama yang mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha juga menjadi tantangan yang signifikan, di mana banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui manfaat dari program-program yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan sosialisasi dari Dinas Pasar untuk mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam program-program tersebut.

Kata Kunci: Peranan, Pasar, Pemberdayaan, Usaha

ABSTRACT

Name : ALI WARDANI
No. Reg : 1940200203
Title : **THE ROLE OF THE MARKET DEPARTMENT IN EMPOWERING BUSINESS ACTORS IN PARGARUTAN MARKET, SOUTH TAPANULI REGENCY**

The purpose of this study is to analyze the role of the Market Service in empowering business actors in Pargarutan Market, South Tapanuli Regency and to determine the obstacles faced by the Market Service in empowering business actors in Pargarutan Market, South Tapanuli Regency. The type of research used in writing this study is descriptive qualitative, which describes the current state of the subject and object of research based on the facts that appear as they are. The data used is primary data as the initial data, which is then continued with secondary data or field data. The results of this study are that the Market Service has a significant role in empowering business actors in Pargarutan Market. Through various programs implemented, such as business management training, access to capital, and promotion of local products. These programs not only provide the knowledge and skills needed to manage a business, but also help business actors expand their networks and increase their competitiveness in an increasingly competitive market. Although the role of the Market Service is very important, there are various obstacles that hinder the effectiveness of empowerment programs. Budget limitations are one of the main obstacles that result in several programs not being able to be implemented optimally. In addition, the lack of active participation from business actors is also a significant challenge, where many business actors do not know the benefits of the programs offered. This shows the need for increased communication and socialization from the Market Service to educate business actors about the importance of their involvement in these programs.

Keywords: Role, Market, Empowerment, Business

المُخَصَّصُ

الاسم : ALI WARDANI
عدد الطلاب معرف : ١٩٤٠٢٠٠٢٠٣
عنوان : دور إدارة السوق في تمكين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال في سوق بارغاروتان، مقاطعة جنوب تابانولي

وتلعب الأسواق التقليدية دوراً هاماً في الاقتصاد الإقليمي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد سبل عيشها على الأنشطة التجارية. يعد سوق بارغاروتان أحد المراكز الاقتصادية المحلية، وهو مكان للتفاعل الاقتصادي الكبير، لكنه غالباً ما يواجه تحديات مختلفة مثل المرافق البسيطة، والوصول المحدود إلى رأس المال، ونقص المساعدة التجارية. كان الغرض من هذه الدراسة تحليل دور خدمة السوق في تمكين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال في سوق بارغاروتان، مقاطعة جنوب تابانولي، وتحديد العقبات التي تواجه خدمة السوق في تمكين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال في سوق بارغاروتان، مقاطعة جنوب تابانولي. إن نوع البحث المستخدم في كتابة هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي، أي وصف الحالة الراهنة للموضوع وموضوع البحث استناداً إلى الحقائق التي تظهر كما هي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية، والتي يتم متابعتها بعد ذلك بالبيانات الثانوية أو بيانات الميدان. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن خدمة السوق لها دور مهم في تمكين الجهات الفاعلة في الأعمال التجارية في سوق بارغاروتان. من خلال برامج مختلفة يتم تنفيذها، مثل التدريب على إدارة الأعمال، والحصول على رأس المال، والترويج للمنتجات المحلية. لا تقدم هذه البرامج المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الأعمال فحسب، بل تساعد رواد الأعمال أيضاً على توسيع شبكاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق تنافسية بشكل متزايد. على الرغم من أهمية دور خدمة السوق، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تعوق فعالية برامج التمكين. تشكل القيود الميزانية إحدى العوائق الرئيسية التي تؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ العديد من البرامج على النحو الأمثل. علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى المشاركة الفعالة من جانب الجهات الفاعلة في مجال الأعمال يشكل أيضاً تحدياً كبيراً، حيث لا يعرف العديد من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال فوائد البرامج المقدمة. ويظهر هذا الحاجة إلى زيادة التواصل والتوعية من جانب خدمة السوق لتنقيف الجهات الفاعلة في مجال الأعمال حول أهمية مشاركتهم في هذه البرامج.

الكلمات المفتاحية: الدور، السوق، التمكين، الأعمال

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Di pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan”**, disusun untuk melengkapi sebagian dari persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah (PS-1), Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan tantangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubung dengan selesainya penulisan skripsi ini maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M. Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Dra. Hj. Replita, M. Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua , Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh Civitas Akademika di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Abdul Nasser Hasibuan,S.E.,M.Si., Pembimbing I dan Ibu Try Wahyu Utami,M.M., Pembimbing II yang telah banyak memberikan Arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa terbaiknya dan pengorbanannya yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti.
9. Saudara tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi agar peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat di UIN SYAHADA Padangsidempuan Ekonomi Syariah angkatan 2019, yang selalu memberikan semangat kepada peneliti serta berjuang bersama dalam penyelesaian tugas akhir masing-masing yaitu penulisan skripsi.
11. Terkhusus untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai pada tahap yang sekarang. Walaupun banyak masalah selama mengerjakan skripsi ini dan peneliti tidak pernah menyerah dan tetap semangat. Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini selesai.

Dengan penuh harapan semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan tercatat dengan amal shalih. Akhirnya karya ini peneliti suguhkan kepada pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbakan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapat ridha Alah SWT.

Padangsidimpuan , Juni 2025
Peneliti,

Ali Wardani
NIM: 19 40200203

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

1. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti

oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Teori.....	13
1. Peranan.....	15
a. Pengertian Peranan.	15
b. Jenis-Jenis Peranan.	17
2. Pemberdayaan.....	17
a. Pengertian Pemberdayaan.....	17
b. Tujuan Pemberdayaan.....	19
c. Pendekatan Pemberdayaan.	20
3. Pelaku Usaha.	21
a. Pengertian Pelaku Usaha.	21
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
c. Prinsip-Prinsip Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	24
B. Penelitian Terdahulu.	24
BAB III Metode Penelitian.....	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Subjek Penelitian.....	30
D. Sumber Data	30
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi.....	31
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi	33
F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.	33
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	33

2. Ketekunan Pengamatan.....	33
3. Triangulasi.....	24
G. Teknik Pengolaan dan Analisis Data	34
1. <i>Reduction Data</i> (Reduksi Data)	34
2. <i>Display Data</i> (Penyajian Data)	35
3. <i>Conclusion</i> (Verifikasi).....	35
C. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
B. Deskripsi Data Penelitian	47
C. Hasil Penelitian	50
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
E. Keterbatasan Penelitian	71
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi di Pasar Pargarutan yaitu menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang berserakan, drainase atau saluran pembuangan air yang tidak terawat juga menyebabkan lingkungan sekitarnya terkesan menjadi kumuh, sehingga mengganggu pemandangan dan pernafasan serta fasilitas kebersihan kurang memadai. Selain itu, tata letak penempatan kios di pasar tersebut juga tidak teratur. Berdasarkan pengamatan sementara di sekitar pasar, sampah yang dihasilkan para pedagang hanya dibuang sembarangan di sekitar tempat mereka berdagang. Mereka sama sekali tidak menyediakan tempat khusus sebagai penampungan sampah sementara di kios/toko mereka. Akibatnya lorong/jalan yang digunakan untuk berbelanja menjadi kotor oleh daun-daunan, buah-buahan, plastik, kertas pembungkus dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, sampah-sampah tersebut terkadang bercampur dengan air bekas mencuci ikan atau daging yang dibuang sembarangan. Akibatnya lorong pasar menjadi becek dan bau, dimana hal tersebut terjadi karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pihak Dinas Perdagangan. Hal ini tentu mengakibatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja menjadi kurang nyaman.

Pembangunan/rehab Pasar Rakyat di Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilakukan hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang masih terus dilaksanakan. Pembangunan bidang pengelolaan pasar diarahkan untuk memperlancar arus barang serta untuk

meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pasar.
2. Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar penunjang.¹

Tabel 1 Data Ukuran dan Tata Letak Kios di Pasar Pargarutan

NO.	LANTAI	Ukuran Kios		
		2,5 x 3 meter	2 x 3 meter	2 x 2 meter
1.	Lantai I	15 unit	16 unit	70 unit
2.	Lantai 2	-	13 unit	70 unit

Sumber: (Koordinator Pasar Pargarutan, September 2024)

Dari tabel data ukuran dan tata letak kios di Pasar Pargarutan dapat dilihat bahwa jumlah kios pada ukuran 2,5x 3 meter sebanyak 15 unit, ukuran 2 x 3 meter sebanyak 29 unit, ukuran 2 x 2 meter sebanyak 140 unit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Pasar Pargarutan, menyatakan bahwa:

“Kondisi kios di Pasar Pargarutan Kumuh bau dan jorok, Susunan tataletak barang yang di jual di pasar pargarutn itu tidak teratur, Atap balerongnya sudah rusak dan berbocoran”

Pemberdayaan adalah tugas yang di emban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi potensinya. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya perdayaan dari pemerintah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejolak-gejolak sosial tersebut. Dalam konteks ini penting sekali untuk menekan

¹ <https://disdagkop.tapselkab.go.id/content/content.htm>, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 22.25 WIB.

kepada masyarakat bahwa pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena dengan hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan untuk mereka, serta mengembangkan inovasi-inovasi mereka untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhannya.²

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.³

Dinas Perdagangan khususnya Bidang Penataan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas yang dibagi dalam beberapa seksi yaitu seksi penataan dan pengendalian pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pengendalian pasar dan pelaku usaha, Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pasar dan penataan pedagang kaki lima atau pelaku usaha. Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pasar dan pelaku usaha, Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya, keamanan, kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima atau

² Candra Arysta Putra Pradana, dkk., "Peran Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 95-101.

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

pelaku usaha, Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima atau pelaku usaha, Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima atau pelaku usaha.⁴

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum (seperti yang ada di pasar tradisional). Fasilitas generik yang terdapat berupa mendorong aktivitas Orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, dan pasar merupakan sarana ekonomi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Yaitu dari pasar karena Pasar merupakan tempat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan unsur sosial, ekonomi, politik serta budaya. Kemajuan pada bidang ekonomi jua ditentukan oleh kemajuan dan jaman yang selalu berubah. Jika Anda melihat sejarah.

Dalam rangka menciptakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum, pekerjaan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah para pengusaha yang menggunakan media pasar untuk kegiatan ekonomi. Pasar merupakan salah satu alat ekonomi yang menjadi tolak ukur peningkatan pendapatan ekonomi daerah, dan jika ditujukan khusus pada wilayah regional maka pasar merupakan satu-satunya tempat transaksi ekonomi. Pasar adalah tempat dengan elemen sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya. Pasar juga merupakan salah satu sistem

⁴ Nofianti, dkk, "Peran Dinas Perdagangan Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 493-494.

terpenting dalam sistem perekonomian dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi.⁵

Hal ini yang lalu mendorong terjadinya pasar, menjadi lokasi pertemuan orang-orang yang mempunyai kebutuhan berbeda-beda buat pada barter juga menjualnya pada pedagang, sebagaimana pernah di lakukan Para Rasul yang pada dikisahkan Allah pada Q.S. Al-Furqan/25:20 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهَدْلِيَا كُلُّونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ^٥ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا^٦

Artinya:“dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat”.⁶

Pada hakikatnya Ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia, Kata Islam “ekonomi” dalam ucapan ekonomi islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi, dalam bahasa Arab istilah ekonomi disebut dengan kata *al-iqtisad*, yang artinya kesederhanaan, dan kehematan,dari kata *al-iqtisad* yang berekmbang sebagai makna ilmi *al-iqtisad* yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalahmasalah ekonomi, sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi *rahmatan lil alamin*. Dalam Ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan dan

⁵ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: University Press, 2007), hlm. 15.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020), hlm. 109.

manfaat non-materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, dan kepedulian sosial dan sebagainya.⁷

Dalam mengelolah pasar, Islam memberikan tuntutan yang baik pada pemerintah, menggunakan mengacu dalam kegiatan pada zaman Rasulullah dan para khalifah. Selain itu para pemikir Islam pula banyak menaruh pandangannya demi tercapainya pasar yang ideal. Artinya, Islam dengan terang memberikan petunjuk bagi pemerintah supaya berperan tidak hanya pada sektor fisik akan tetapi juga non fisik. Selain itu, harga pada pasar di tentukan oleh pasar itu sendiri, lantaran pasar di nilai menjadi *sunnatullah*. Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiq, menjelaskan bahwa pasar memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi bebas. Dalam kapitalis yang meniti beratkan pada “sistem liberal”, pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi.⁸

Jika dilihat dari tugas Dinas Perdagangan di Pasar Pargarutan melalui bidang pasar adalah mengontrol dan menata pedagang dalam berjualan di pasar tersebut seperti penataan lokasi jualan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder agar tidak berantakan. Akan tetapi sesuai fakta di lapangan Pasar Pargarutan masih sangat tidak sesuai dengan ketentuan pasar pada umumnya. Misalnya, penyediaan lapak, kebersihan, tempat parkir yang teratur, serta iuran lapak rutin pedagang untuk mendukung pembangunan pasar.

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah Dinas Perdagangan

⁷ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1.

⁸ Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 206

memiliki peran strategis dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Pasar Pargarutan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar, Dinas Perdagangan dapat memberikan fasilitas, pelatihan, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM. Namun, banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya inovasi bisnis, serta daya saing produk yang masih rendah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program yang telah dijalankan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan daya tarik pasar sebagai pusat ekonomi lokal.

Fenomena urgensi untuk diteliti dalam penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan telah memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM, baik dalam peningkatan omzet, akses ke pasar yang lebih luas, maupun peningkatan kualitas produk. Selain itu, perlu diteliti juga kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses program-program yang disediakan, serta bagaimana strategi Dinas Perdagangan dalam mengoptimalkan perannya. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan di Pasar Pargarutan.

Alasan judul penelitian ini dipilih karena pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan. Pasar Pargarutan sebagai salah satu pusat ekonomi lokal menjadi tempat interaksi

ekonomi yang signifikan, namun sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya fasilitas, keterbatasan akses modal, dan kurangnya pendampingan usaha. Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta penataan sistem perdagangan agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta menemukan solusi terhadap hambatan yang masih dihadapi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal, khususnya dalam mengoptimalkan peran pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Poin penting dalam pembahasan ini adalah peran strategis Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan, yang mencakup peningkatan infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, dan penataan sistem perdagangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menilai efektivitas program yang telah dijalankan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, banyak kajian yang telah membahas

peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek pengelolaan pasar secara umum tanpa menggali secara mendalam efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung membahas dampak infrastruktur dan regulasi pasar terhadap aktivitas ekonomi, tetapi belum banyak yang menganalisis bagaimana program pelatihan, pendampingan usaha, serta akses permodalan benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing pedagang di pasar tradisional. Ketiga, belum ada penelitian spesifik yang menyoroti kondisi Pasar Pargarutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, padahal setiap pasar memiliki karakteristik, tantangan, serta kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara lebih komprehensif peran Dinas Perdagangan dalam memberdayakan pelaku usaha, mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di pasar tradisional.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman atau untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada “Peranan Dinas Perdagangan dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan”.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁹
2. Dinas Perdagangan atau Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar. Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pasar.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm . 242.

Dinas Perdagangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan di Pasar Pargarutan.

3. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemampuan diri mereka masing-masing. Upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi untuk menentukan pilihan kegiatan, masyarakat lebih mampu mengidentifikasi menilai dan memformulasikan permasalahannya baik fisik sosial maupun ekonomi. Upaya pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja maka salah satunya oleh kebijakan pengembangan pelaku usaha¹⁰
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbeniuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di

¹⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pengembangan Untuk Rakyat , Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Grasindo, 2006), hlm. 169.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 41.

Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pemberdayaan pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada di dunia nyata berdasarkan teori-teori yang pernah diperoleh, adapun temuan penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

Pembangunan ekonomi lokal (PEL) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal.¹² Menurut Blakely & Bradshaw (2002), pembangunan ekonomi lokal adalah proses di mana pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing usaha lokal. PEL berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dengan menekankan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, optimalisasi potensi daerah, dan peningkatan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.¹³

Salah satu prinsip utama dalam teori pembangunan ekonomi lokal adalah pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi strategi ekonomi. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), menyediakan akses permodalan, serta memperbaiki infrastruktur pasar dan sarana perdagangan lainnya. Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat juga didorong untuk

¹² Sumilat, R. D. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan)." *Politico* 9, no. 1: 1-10, 2020.

¹³ Yusri, M. "Analisis Deskriptif Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan." *Humanitatis* 6, no. 1: 15-25, 2019.

berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan jaringan usaha untuk meningkatkan daya saing mereka.

Pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal meliputi strategi bottom-up, di mana perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah, bukan sekadar mengikuti kebijakan nasional secara top-down. Pendekatan ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis realitas sosial ekonomi setempat. Misalnya, penguatan pasar tradisional dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM, penyediaan akses modal yang lebih mudah, serta pengelolaan infrastruktur pasar yang lebih baik agar dapat bersaing dengan sektor ritel modern.¹⁴

Teori pembangunan ekonomi lokal juga menyoroti peran inovasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Schumpeter (1934) dalam teori inovasinya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh aktivitas inovatif yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁵ Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, inovasi dapat berupa pengembangan produk berbasis kearifan lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, atau integrasi pasar tradisional dengan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

¹⁴ Moku, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)." *Governance* 1, no. 2: 45-55, 2021.

¹⁵ Setiawan, L. *Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018

Selain inovasi, keberlanjutan juga menjadi aspek penting dalam teori ini. Pembangunan ekonomi yang berorientasi jangka panjang harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi lokal juga menekankan pentingnya ekonomi hijau, seperti pengelolaan limbah pasar yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan dalam operasional usaha, serta penguatan komunitas ekonomi berbasis sosial untuk menciptakan inklusivitas dalam pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi lokal sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, serta masih terbatasnya kapasitas SDM di tingkat lokal. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi lokal harus terus dikembangkan dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat agar dapat menciptakan model pembangunan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

1. Peranan

a. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁶

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁷ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁶ R. Suty Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm. 348.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm . 242.

- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari pengembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. Konsep pemberdayaan ditegarai mulai muncul sekitar dekade 70-an dan kemudian berkembang terus hingga kini, bersamaan dengan makin merebaknya pemikiran posmodernisme. *Empowerment* Eropa modern pada hakikatnya merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan inilah yang kemudian menjadi substansi

pemberdayaan. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain. Samuel Paul, misalnya, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.¹⁸

¹⁸ Moh Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menurut Chabib Soleh menjelaskan secara rinci untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut, terdapat beberapa sasaran antara lain yaitu:¹⁹

- 1) Perbaiki kelembagaan, hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi social yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat.
- 2) Perbaiki pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Perbaiki lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
- 4) Perbaiki akses, baik berkenaan dengan akses inovasi tekhnologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energy listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar

¹⁹Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Bogor: Toha Putra 2021), hlm. 76.

dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik.

- 5) Perbaiki tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermanfaat.
- 6) Perbaiki usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing.
- 7) Perbaiki bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan melalui 5P menurut Suharto, lebih jelasnya dideskripsikan sebagai berikut:²⁰

- 1) Pemungkinan. Pemungkinan yaitu, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Indikator dari pemungkinan ini yaitu Penyediaan lokasi dan Pemberian Izin Usaha.
- 2) Penguatan. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Indikator dari tahap penguatan ini yaitu pemberian pelatihan kewirusahaan dan bantuan permodalan.

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 67-68.

- 3) Perlindungan. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompokkelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Indikator dari tahap perlindungan ini yaitu Perlindungan dari gangguan dari usaha besar dan preman dan pengontrolan harga bahan baku.
- 4) Penyokongan. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Indikator dari tahap ini yaitu bantuan dalam bentuk dana atau peralatan dan bantuan pemasaran lokal.
- 5) Pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Indikator dalam tahap ini yaitu pembagian kekuasaan antar pelaku usaha dan menjaga keseimbangan pasar.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha didalam hukum positif di Indonesia dapat kita temukan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha adalah setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan kelompok besar kalangan pelaku ekonomi: tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha, (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

- 1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti Perbankan, usaha asing, dan penyedia dana lainnya.
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/atau badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, jasa angkutan, perasuransian, perbankan, kesehatan, obat-obatan.
- 3) Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.

b. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu azas yang dikenal dengan dalam hukum perjanjian. Kelentuan tentang beritikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu

produk, agar konsumen salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi tersebut berupa representasi, peringatan maupun yang berupa intruksi.

c. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggungjawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²¹

- 1) Kesalahan (*liability based on fault*)
- 2) Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*)
- 3) Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*)
- 4) Tanggungjawab mutlak (*strict liability*)
- 5) Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh oleh para peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meneliti apakah terdapat

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), him. 59.

kesamaan atau perbedaan objek dan subjek yang digunakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya (terdahulu). Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muddasir, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)	Peran Dinas Perdagangan Dalam Penanganan Operasional Pasar Sapi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	Hasil Penelitian : 1) Peran Dinas Perdagangan dalam menangani operasional Pasar Sapi di Kecamatan Kalisat-Jember meliputi perencanaan yang mana wajib dimiliki oleh pihak pengelola kemudian pengorganisasian hasil dari perencanaan yang direalisasikan dan dalam pelaksanaannya pastinya tidak lepas dari pengarah dan pengawasan dari pihak pengelola sendiri serta evaluasi. 2) Penerapan sistem jual beli yang ada dalam Pasar Sapi Kecamatan Kalisat-Jember terdiri dari beberapa aspek yaitu adanya pelaku transaksi yang mana terdiri dari penjual dan pembeli yang ada di pasar kemudian adanya objek transaksi yaitu dalam penelitian ini fokus pada hewan ternak yang kebanyakan hewan sapi dan selanjutnya yaitu akad transaksi dalam hal ini kesepakatan antara penjual dan pembeli. ²²

²² Muddasir, "Peran Dinas Perdagangan Dalam Penanganan Operasional Pasar Sapi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 8.

2.	Seravina Woga, (Skripsi, Universitas Merdeka Malang, 2022)	Peran Dinas Perdagangan Kota Malang Terhadap Penataan Pasar Tradisional (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian Studi Di Pasar Mergan Kecamatan Klojen, Kota Malang)	Peran peran Dinas Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang masih belum maksimal yaitu dengan belum tercapainya peran dinas sebagai pelaksana dalam penataan pasar tradisional. Peran Dinas Perdagangan sebagai pelaksana sekiranya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. ²³
3.	Gilang Ramadhan, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022). ²⁴	Peran Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Memberdayakan UMKM Pada Masa Covid 19.	Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan pemberdayaan dinas perdagangan kota makassar bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Di kota Makassar sudah baik.
4.	Aprillia P.G. Assa, dkk, (Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa	Perencanaan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar tradisional sudah melakukan perencanaan, yaitu perencanaan program pasar daging selanjutnya ada pembagian kelompok dan pos-pos untuk menagih retribusi di pasar, kurang lebih ada 5 kelompok yang dibagi untuk menjalankan tugas dan fungsi dari

²³ Seravina Woga, "Peran Dinas Perdagangan Kota Malang Terhadap Penataan Pasar Tradisional (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian Studi Di Pasar Mergan Kecamatan Klojen, Kota Malang)", *Skripsi*, (Universitas Merdeka Malang, 2022), hlm. 13.

²⁴ Gilang Ramadhan, "Peran Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Memberdayakan UMKM Pada Masa Covid 19", *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), hlm. 1.

			masing-masing kelompok yang telah dibentuk. pengelolaan pasar tradisional langowan sudah terlaksana walaupun dalam pelaksanaan pembangunan dan penataan pasar belum terealisasi secara optimal dikarenakan sedang menunggu dana pusat. ²⁵
5.	Nofianti, dkk, (eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 7, No. 1. 2019)	Peran Dinas Perdagangan Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda	Pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota samarinda belum bisa dikatakan efektif karena walaupun sudah berhasil melakukan pembinaan, namun jumlah PKL yang bersedia untuk direlokasi dan ditata kebagian dalam pasar masih sangat sedikit. Kegiatan Pembinaan belum bisa mengurangi jumlah PKL yang berada dikawasa Pasar Sungai Dama, hal tersebut terlihat dari PKL yang semakin hari semakin bertambah dan jumlah jenis dagang yang berbeda-beda pula. ²⁶

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan beberapa hal, yaitu:

1. Persamaan dengan penelitian Muddasir yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai peran Dinas Perdagangan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti terdahulu meneliti penanganan operasional pasar sapi,

²⁵ Aprillia P.G. Assa, dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 1.

²⁶ Nofianti, dkk, "Peran Dinas Perdagangan Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1. 2019, hlm. 493.

sedangkan peneliti meneliti dalam perberdayaan pelaku usaha.

2. Persamaan dengan penelitian Seravina Woga yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai peran Dinas Perdagangan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti terdahulu meneliti penataan pasar tradisional, sedangkan peneliti meneliti dalam perberdayaan UMKM.
3. Persamaan dengan penelitian Gilang Ramadhan yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai pemberdayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti terdahulu meneliti peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM, sedangkan peneliti meneliti peranan Dinas Perdagangan dalam perberdayaan pelaku usaha.
4. Persamaan dengan penelitian Aprillia P.G. Assa, dkk yaitu terletak pada tempat penelitian yang sama yaitu di pasar tradisional. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti terdahulu meneliti peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar tradisional, sedangkan peneliti meneliti peranan Dinas Perdagangan dalam perberdayaan pelaku usaha.
5. Persamaan dengan penelitian Nofianti, dkk yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai peran Dinas Perdagangan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti terdahulu meneliti pembinaan pedagang kaki lima, sedangkan peneliti meneliti dalam perberdayaan pelaku usaha.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Pargarutan beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Sosopan Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kode pos 22733. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari Oktober 2024 sampai November 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Yang dimana menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan. Sedangkan ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.²⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan Peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan dan penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Jadi, sumber yang bersedia memberikan informasi dalam pengumpulan data penelitian berasal dari informan.²⁸ Subjek penelitian ini adalah pengelola pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan, bagian Koordinator Pasar Pargarutan dan 5 pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data

Data dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁹

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Data primer dalam penjelasan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan subjek penelitian yaitu dari dinas perdagangan dan juga para pedagang di pasar pargarutan Tapanuli Selatan.

²⁸Sri Wahyuni Hasibuan, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 137-138.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2022), hlm.135.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 402.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir. Untuk itu penulis memerlukan kajian teoritik yang mendalam untuk menghasilkan deskriptip teori yang benar-benar yang dapat mendasari kerangka berpikir. Sumber teori dapat berupa buku, jurnal mutakhir, jurnal pada internet dan referensi lainnya.³¹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari catatan arsip, dokumentasi perusahaan yakni data berupa jumlah pelaku usaha yang diperoleh dari dinas perdagangan, buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan pelaku usaha.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mengadakan suatu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap objek yang akan di teliti.³² Observasi juga merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pelaksanaan observasi di lakukan dengan tiga cara yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung maupun observasi partisipasi.

³¹Widjono, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 248.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), hlm. 129.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi langsung dan observasi tidak langsung. menggunakan teknik observasi langsung yaitu terjun langsung ke lapangan ke dinas perdagangan dan juga pasar pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan suatu pengamatan. Teknik observasi tidak langsung yaitu karena dalam melakukan praktek peneliti menggunakan perantara para anggota dinas perdagangan untuk mengelola dan mengamati kegiatan dagang di pasar.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses untuk memperoleh suatu informasi dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan subjek yang akan di teliti. Wawancara memiliki dua jenis yaitu wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur yang dimana wawancara terstruktur yaitu wawancara sebagaimana jenis pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya disesuaikan dengan kondisi di tempat penelitian.³³

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dimana wawancaranya sudah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai dinas

³³ Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial (Jakarta: Publica Institute,2012),hlm.182.

perdagangan dan pelaku usaha yang ada di pasar pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, tulisan, maupun karya-karya monumental dari seseorang.³⁴

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pendapat Lexy Moeleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:³⁵

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang ditampilkan. Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun ke lokasi peneliti akan mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mempengaruhi hasil data penelitian

2. Ketekunan Pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri dan *unsure* dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memutuskan diri pada hal tersebut secara rinci.

³⁴Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), hlm 149.

³⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 75.

3. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Adapun caranya membandingkan hasil observasi dan wawancara atau mengecek kembali dengan mewawancarai informan penelitian kembali kelapangan guna memverifikasi ulang hasil wawancara.

G. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁶ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan

³⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

pengumpulan data selanjutnya mengenai peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *display* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁷

C. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun proposal ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 161-162

BAB I terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II landasan teori yang terdiri dari Peranan Dinas Perdagangan dalam Pemberdayakan pelaku usaha di Pasar Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan dan penecekan data, dan sistematika pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Umum Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan

Dinas Perdagangan Pargarutan di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Sejak awal berdirinya, Dinas ini berfungsi sebagai pengelola pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas perdagangan bagi warga. Pasar Pargarutan bukan hanya sekadar tempat jual beli, tetapi juga berperan sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarwarga, di mana berbagai lapisan masyarakat dapat bertemu dan berinteraksi.

Pada masa awal, pasar ini memiliki bentuk yang sederhana, dengan pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka secara langsung. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, Dinas Perdagangan Pargarutan mulai melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pasar. Perbaikan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi pengunjung, sehingga pasar dapat berfungsi dengan lebih baik.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perdagangan Pargarutan juga menerapkan sistem manajemen yang lebih

modern. Pengaturan lokasi dan jadwal pedagang menjadi salah satu fokus utama, dengan harapan dapat menciptakan suasana pasar yang lebih teratur dan efisien. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan pengunjung merasa lebih nyaman saat berbelanja, dan pedagang pun dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih optimal.

Dinas ini juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan dan pendampingan bagi para pedagang. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dengan meningkatkan kapasitas para pedagang, Dinas Perdagangan Pargarutan berharap dapat mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga daya tarik pasar semakin meningkat.

Selain itu, Dinas Perdagangan Pargarutan aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan promosi untuk menarik perhatian masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah sering dilakukan untuk menyelenggarakan festival dan acara budaya yang merayakan kekayaan lokal. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kunjungan ke pasar, tetapi juga untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Dalam era digital saat ini, Dinas Perdagangan Pargarutan juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk-produk lokal. Penggunaan media sosial dan platform e-commerce menjadi strategi penting untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan

memanfaatkan teknologi, para pedagang dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat bersaing dengan pasar modern yang semakin berkembang.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern dan e-commerce. Dinas Perdagangan Pargarutan harus terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan. Upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperkuat identitas pasar tradisional, menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Dinas ini juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas lokal.

Keberadaan Dinas Perdagangan Pargarutan juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Pasar tradisional sering kali menjadi tempat di mana tradisi dan kebudayaan setempat dipertahankan dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, Dinas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pasar, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya yang harus dilestarikan.

Secara keseluruhan, sejarah Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan mencerminkan perjalanan panjang yang penuh dinamika. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan Dinas ini dapat terus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, pasar tradisional diharapkan dapat terus berkembang dan

menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan.

2. Visi

Menjadi lembaga pengelola pasar yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing, berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan pelestarian budaya.

3. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada para pedagang dan pengunjung pasar, serta menciptakan suasana pasar yang nyaman dan aman.
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan pedagang, serta memfasilitasi akses pasar bagi produk lokal.
- c. Inovasi dan Modernisasi: Mengimplementasikan sistem manajemen pasar yang modern dan efisien, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan produk lokal dan meningkatkan daya saing pasar.
- d. Pelestarian Budaya dan Tradisi: Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal melalui pengembangan pasar tradisional sebagai ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat.
- e. Kerjasama dan Kolaborasi: Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan

komunitas lokal, untuk meningkatkan pengelolaan pasar dan memperluas jaringan distribusi produk.

- f. Peningkatan Infrastruktur Pasar: Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pasar untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengunjung serta meningkatkan daya tarik pasar.
- g. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbelanja di pasar tradisional dan mendukung produk lokal melalui kampanye dan program edukasi.

4. Ruang Lingkup Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan

Ruang lingkup Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional dan pengembangan ekonomi lokal. Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar berfungsi dengan baik sebagai pusat perdagangan, tempat interaksi sosial, dan pelestarian budaya. Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan Pargarutan berperan sebagai pengelola yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya masyarakat.

Salah satu tugas utama Dinas Perdagangan Pargarutan adalah pengelolaan dan pengawasan pasar tradisional. Ini mencakup penataan lokasi pedagang, pengaturan jadwal operasional, serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan pasar dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pengunjung, serta

mendukung aktivitas perdagangan yang lancar. Dinas ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pedagang mematuhi peraturan yang ditetapkan, sehingga tercipta suasana pasar yang tertib.

Selain pengelolaan pasar, Dinas Perdagangan Pargarutan juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi lokal. Dinas ini berupaya untuk memberdayakan para pedagang melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dengan meningkatkan kapasitas para pedagang, Dinas Perdagangan Pargarutan berharap dapat mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga daya tarik pasar semakin meningkat.

Dinas Perdagangan Pargarutan juga berperan dalam mempromosikan produk lokal. Melalui berbagai kegiatan promosi, seperti festival dan bazar, Dinas ini berusaha untuk menarik perhatian masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pedagang lokal. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, pasar tradisional dapat berfungsi sebagai wadah untuk melestarikan budaya lokal.

Dalam era digital, Dinas Perdagangan Pargarutan juga mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar. Penggunaan media sosial dan platform e-commerce menjadi salah satu strategi untuk mempromosikan produk lokal. Dengan memanfaatkan

teknologi, para pedagang dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional. Ini merupakan langkah penting untuk menghadapi tantangan persaingan dengan pasar modern dan e-commerce yang semakin berkembang.

Ruang lingkup Dinas Perdagangan Pargarutan juga mencakup pengembangan infrastruktur pasar. Dinas ini berupaya untuk meningkatkan fasilitas pasar, seperti area parkir, sanitasi, dan ruang tunggu, agar pengunjung merasa lebih nyaman saat berbelanja. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pertumbuhan pasar dan meningkatkan pengalaman berbelanja bagi masyarakat.

Dinas Perdagangan Pargarutan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan pasar tradisional. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan perilaku konsumen, Dinas ini harus terus berinovasi dan beradaptasi agar pasar tetap relevan. Upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperkuat identitas pasar tradisional, menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Dinas ini juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengembangan pasar.

Aspek lain yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Pargarutan adalah pelestarian budaya dan tradisi lokal. Pasar tradisional sering kali menjadi tempat di mana nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat dipertahankan dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Oleh karena

itu, Dinas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pasar, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya yang harus dilestarikan. Melalui berbagai kegiatan budaya, Dinas ini berupaya untuk memperkuat identitas lokal dan meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka.

Secara keseluruhan, ruang lingkup Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam pengelolaan pasar tradisional dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Dinas ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan pengembangan infrastruktur pasar. Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, pasar tradisional diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan.

5. Lokasi Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan

Dinas Perdagangan Pargarutan terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu daerah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Lokasi Dinas ini sangat strategis, berada di pusat kota Pargarutan, yang merupakan salah satu kecamatan penting di kabupaten tersebut. Keberadaan Dinas di lokasi ini memudahkan akses bagi masyarakat, baik pedagang maupun pengunjung, untuk mendapatkan layanan yang diperlukan terkait dengan pengelolaan pasar.

Pasar Pargarutan sendiri merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Lokasi pasar yang

berdekatan dengan Dinas Perdagangan memudahkan koordinasi antara pengelola dan pedagang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pasar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan lokasi yang strategis, Dinas Perdagangan Pargarutan dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan pengelolaan pasar secara efektif.

Aksesibilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan lokasi Dinas Perdagangan Pargarutan. Dinas ini dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dari berbagai penjuru, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Keberadaan jalan yang baik dan infrastruktur transportasi yang memadai mendukung mobilitas masyarakat untuk berkunjung ke pasar. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke pasar, sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung dengan lebih dinamis.

Di sekitar lokasi Dinas Perdagangan Pargarutan, terdapat berbagai fasilitas umum yang mendukung kegiatan pasar. Misalnya, terdapat area parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan pengunjung, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Keberadaan fasilitas ini sangat penting untuk menciptakan suasana pasar yang nyaman dan bersih, sehingga pengunjung merasa betah berbelanja. Dinas Perdagangan juga berupaya untuk terus meningkatkan fasilitas yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, lokasi Dinas Perdagangan Pargarutan yang berada di pusat kota juga memberikan peluang untuk mengembangkan berbagai kegiatan promosi dan acara budaya. Dinas ini sering mengadakan festival dan bazar yang melibatkan masyarakat lokal, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung ke pasar. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga. Dengan demikian, lokasi Dinas Perdagangan Pargarutan berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dinas Perdagangan Pargarutan juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi para pedagang dan masyarakat. Dengan lokasinya yang strategis, Dinas ini dapat memberikan informasi terkait peraturan pasar, pelatihan bagi pedagang, serta program-program pengembangan ekonomi lokal. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbisnis. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas produk dan layanan yang ditawarkan di pasar.

Keberadaan Dinas Perdagangan Pargarutan di lokasi yang strategis juga mendukung upaya pelestarian budaya lokal. Pasar tradisional sering kali menjadi tempat di mana tradisi dan kebudayaan setempat dipertahankan dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Dengan adanya Dinas yang berfungsi sebagai pengelola pasar, pelestarian budaya lokal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ini menjadi salah satu cara untuk menjaga identitas budaya daerah di tengah arus modernisasi.

Dinas Perdagangan Pargarutan juga berperan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Lokasi yang strategis memudahkan Dinas untuk berkolaborasi dalam berbagai program pengembangan pasar dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Perdagangan Pargarutan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, lokasi Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pasar tradisional dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan aksesibilitas yang baik, fasilitas yang memadai, dan dukungan dari berbagai pihak, Dinas ini diharapkan dapat terus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, pasar tradisional diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian tentang peranan Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan dukungan terhadap para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi sejauh mana Dinas Perdagangan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha di pasar tradisional tersebut. Pasar Pargarutan merupakan salah satu pasar yang vital bagi perekonomian lokal, di mana ribuan pelaku usaha beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup jumlah pelaku usaha yang terdaftar di Pasar Pargarutan. Adapun respondennya terdiri dari

1. Pedagang kios : 44 Orang
2. Pedagang Losd : 80 Orang
3. Pedagang Pelataran : 120 Orang

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat sekitar 500 pelaku usaha yang aktif berjualan di pasar ini. Mereka terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari pedagang makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan. Keberagaman jenis usaha ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar di Pasar Pargarutan, serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dalam mengelola dan memberdayakan para pelaku usaha.

Dinas Perdagangan Pargarutan memiliki beberapa program pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Salah satu program utama adalah pelatihan manajemen usaha yang diadakan secara berkala. Dalam penelitian ini, data menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaku usaha telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan mengikuti pelatihan,

pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat mengelola usaha dengan lebih baik.

Selain pelatihan, Dinas Perdagangan juga memberikan dukungan dalam bentuk akses permodalan. Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, Dinas Perdagangan memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Data penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% pelaku usaha di Pasar Pargarutan telah memanfaatkan program permodalan ini. Dengan adanya akses permodalan, pelaku usaha dapat mengembangkan usaha mereka, membeli stok barang, dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Dinas Perdagangan juga berperan dalam mempromosikan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Melalui berbagai kegiatan promosi, seperti bazar dan festival, Dinas Perdagangan berusaha untuk menarik perhatian masyarakat terhadap produk lokal. Penelitian ini mencatat bahwa partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi tersebut meningkat, dengan sekitar 40% pelaku usaha aktif terlibat dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan. Kegiatan promosi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat identitas pasar sebagai pusat produk lokal.

Dalam konteks pengawasan dan pengelolaan pasar, Dinas Perdagangan juga melakukan evaluasi berkala terhadap pelaku usaha. Data menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan melakukan survei kepuasan terhadap pelaku usaha dan pengunjung pasar setiap enam bulan. Hasil survei ini digunakan untuk

mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan ini, Dinas Perdagangan berupaya untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Pargarutan memiliki peranan yang signifikan dalam pemberdayaan pelaku usaha di pasar tradisional. Melalui program pelatihan, dukungan permodalan, dan kegiatan promosi, Dinas Perdagangan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan dengan pasar modern dan e-commerce, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan diharapkan dapat terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian budaya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan

Peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan sangat penting dan strategis. Dinas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pasar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal,

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan

Dalam wawancara ini, Kepala Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa

Salah satu fokus utama mereka adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan manajemen usaha. “Kami menyadari bahwa banyak pelaku usaha yang memiliki potensi, tetapi kurang dalam hal manajemen. Oleh karena itu, kami mengadakan pelatihan secara berkala yang mencakup manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Kami berharap pelatihan ini dapat membantu pelaku usaha untuk lebih percaya diri dan kompetitif di pasar,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa sekitar 60% pelaku usaha di Pasar Pargarutan telah mengikuti pelatihan ini.³⁸

Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan menunjukkan komitmen Dinas dalam meningkatkan keterampilan pelaku usaha. Pelatihan manajemen usaha menjadi salah satu strategi penting untuk memberdayakan pelaku usaha agar mereka dapat mengelola bisnis dengan lebih baik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan dapat bersaing dengan lebih efektif di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini juga mencerminkan kesadaran Dinas Perdagangan akan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan adalah pelatihan manajemen usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka. Dengan pelatihan yang terstruktur, pelaku usaha

³⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pkl. 09.12 WIB

diharapkan dapat memahami aspek-aspek penting dalam manajemen, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga praktik langsung yang dapat diterapkan dalam usaha sehari-hari.

Selain pelatihan, Dinas Perdagangan juga memberikan dukungan dalam bentuk akses permodalan. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dinas Perdagangan berupaya menjembatani kebutuhan ini dengan menyediakan informasi dan akses ke lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Dengan adanya dukungan permodalan, pelaku usaha dapat membeli stok barang, memperluas usaha, dan meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Siti, Pedagang Sayur Ibu Siti, seorang pedagang sayur, mengungkapkan bahwa

Betapa pentingnya dukungan Dinas Perdagangan dalam hal akses permodalan. “Sebelumnya, kami kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Namun, Dinas Perdagangan membantu kami untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Ini sangat membantu kami untuk membeli stok barang dan memperluas usaha. Dengan modal ini, saya bisa meningkatkan kualitas produk yang saya tawarkan kepada pelanggan,” jelasnya.³⁹

Wawancara dengan Ibu Siti menyoroti pentingnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Dukungan dari Dinas Perdagangan dalam

³⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Pedagang Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pkl. 14;22 WIB

menyediakan pinjaman dengan bunga yang terjangkau memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga pada aspek finansial yang sangat krusial bagi keberlangsungan usaha. Dengan adanya akses permodalan, pelaku usaha seperti Ibu Siti dapat lebih leluasa dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka.

Dinas Perdagangan juga berperan dalam mempromosikan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Melalui berbagai kegiatan promosi, seperti bazar dan festival, Dinas Perdagangan berusaha untuk menarik perhatian masyarakat terhadap produk lokal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik yang berharga. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan pasar.

Bapak Ahmad, seorang pedagang kerajinan tangan, menjelaskan tentang kegiatan promosi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan.

“Kegiatan promosi seperti bazar dan festival sangat membantu kami untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat. Tanpa dukungan dari Dinas Perdagangan, produk kami mungkin tidak akan mendapatkan perhatian yang cukup. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan penjualan,

tetapi juga memberikan kesempatan bagi kami untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik yang berharga,”⁴⁰

Wawancara dengan Bapak Ahmad menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan memiliki dampak positif terhadap penjualan dan visibilitas produk lokal. Kegiatan ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Interaksi langsung ini penting untuk memahami kebutuhan pasar dan meningkatkan kualitas produk. Dengan dukungan Dinas Perdagangan, pelaku usaha seperti Bapak Ahmad dapat lebih mudah menjangkau pelanggan dan membangun loyalitas.

Pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dari peran Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan melakukan survei kepuasan untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi pelaku usaha. Dengan mendengarkan masukan dari pelaku usaha, Dinas Perdagangan dapat memperbaiki dan menyesuaikan program yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Dinas Perdagangan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Dalam wawancara dengan salah satu staf Dinas Perdagangan, mereka menjelaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi program.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Pedagang Kerajinan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pk. 15:02 WIB

“Kami melakukan survei kepuasan setiap enam bulan untuk mengevaluasi program-program yang telah kami jalankan. Hasil survei ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan program mana yang perlu ditingkatkan. Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan suara pelaku usaha dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka,”⁴¹

Wawancara dengan staf Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa evaluasi dan pengawasan merupakan bagian integral dari pengelolaan program. Dengan melakukan survei kepuasan, Dinas Perdagangan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi pelaku usaha. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Dinas Perdagangan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelaku usaha dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dinas

Dinas Perdagangan juga berupaya untuk menciptakan suasana pasar yang bersih dan nyaman. Kebersihan pasar sangat berpengaruh terhadap kenyamanan berbelanja. Dinas Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar, sehingga pengunjung merasa nyaman saat berbelanja. Suasana pasar yang bersih dan teratur tidak hanya menarik lebih banyak pengunjung, tetapi juga mencerminkan kualitas produk yang dijual. Dengan demikian, Dinas Perdagangan berperan penting dalam menciptakan pengalaman berbelanja yang positif bagi masyarakat.

⁴¹ Wawancara dengan Staf Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pkl. 08.22 WIB

Dalam konteks pengembangan infrastruktur, Dinas Perdagangan juga berinvestasi dalam perbaikan fasilitas pasar. Peningkatan infrastruktur pasar, seperti area parkir, sanitasi, dan ruang tunggu, menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas perdagangan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan jumlah pengunjung dan pelaku usaha yang berjualan di Pasar Pargarutan dapat meningkat. Dinas Perdagangan menyadari bahwa infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas perdagangan dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Dinas Perdagangan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan pasar tradisional. Dalam menghadapi tantangan dari pasar modern dan e-commerce, Dinas Perdagangan berkomitmen untuk melestarikan pasar tradisional sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Upaya ini mencakup pengembangan branding pasar dan promosi yang lebih agresif untuk menarik perhatian masyarakat. Dengan dukungan dari Dinas Perdagangan, pelaku usaha merasa lebih percaya diri untuk terus berjualan dan mempertahankan tradisi yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan sangat signifikan melalui program-program seperti pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan promosi produk lokal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha kecil dan menengah melalui berbagai inisiatif pemberdayaan.

Secara keseluruhan, peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan sangat signifikan. Melalui berbagai program dan kegiatan, Dinas Perdagangan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan dengan pasar modern dan e-commerce, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan diharapkan dapat terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian budaya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan

Dinas Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki peran penting dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas program-program pemberdayaan yang telah direncanakan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Dinas Perdagangan sering kali mengalami kendala dalam hal pendanaan untuk melaksanakan program-program pelatihan, promosi, dan pengembangan infrastruktur pasar. Keterbatasan anggaran ini mengakibatkan beberapa program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap pelaku usaha menjadi kurang signifikan.

Dalam wawancara ini, Kepala Dinas Perdagangan mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran.

“Kami sering kali mengalami kendala dalam hal pendanaan untuk melaksanakan program-program pemberdayaan. Anggaran yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk semua kegiatan yang kami rencanakan, seperti pelatihan dan promosi. Hal ini mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap pelaku usaha menjadi kurang signifikan,”⁴²

Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan masalah yang serius dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, Dinas Perdagangan tidak dapat melaksanakan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi Dinas Perdagangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif.

Selain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi hambatan bagi Dinas Perdagangan. Banyak pegawai di Dinas Perdagangan yang belum memiliki pengalaman atau pelatihan yang memadai dalam pengelolaan pasar dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku

⁴² Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pkl. 09.12 WIB

usaha. Dinas Perdagangan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Ibu Siti, seorang pedagang sayur, menjelaskan tentang kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam program-program yang ditawarkan oleh Dinas Perdagangan.

“Banyak dari kami yang tidak tahu tentang manfaat program yang ada. Kadang-kadang, kami merasa program-program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan kami. Dinas Perdagangan perlu lebih aktif dalam mengedukasi kami tentang pentingnya partisipasi dalam program-program tersebut,”⁴³

Wawancara dengan Ibu Siti menyoroti pentingnya komunikasi dan edukasi dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha. Tanpa pemahaman yang jelas tentang manfaat program, pelaku usaha cenderung enggan untuk terlibat. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan perlu melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam menyampaikan informasi dan menjelaskan bagaimana program-program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha

Tantangan lain yang dihadapi Dinas Perdagangan adalah kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha itu sendiri. Banyak pelaku usaha yang masih enggan untuk terlibat dalam program-program yang ditawarkan oleh Dinas Perdagangan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat program tersebut atau ketidakpercayaan terhadap

⁴³ Wawancara dengan Ibu Siti Pedagang Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pkl. 14;22 WIB

efektivitas program yang ada. Dinas Perdagangan perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif untuk mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya partisipasi mereka dalam program-program pemberdayaan.

Bapak Ahmad, seorang pedagang kerajinan tangan, mengungkapkan tantangan yang dihadapi akibat persaingan dengan pasar modern.

“Kami merasa tertekan dengan keberadaan pasar modern yang menawarkan kemudahan bagi konsumen. Dinas Perdagangan perlu menciptakan nilai tambah bagi pasar tradisional agar kami tetap bisa bersaing. Tanpa adanya strategi yang tepat, kami akan semakin terpinggirkan,”⁴⁴

Wawancara dengan Bapak Ahmad menunjukkan bahwa persaingan dengan pasar modern menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha di pasar tradisional. Dinas Perdagangan perlu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya tarik pasar tradisional, seperti memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Ini juga mencerminkan perlunya inovasi dalam pendekatan pemasaran untuk menarik kembali konsumen yang mungkin lebih memilih pasar modern.

Persaingan dengan pasar modern dan e-commerce juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak pelaku usaha di Pasar Pargarutan yang merasa tertekan oleh keberadaan pasar modern yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Dinas Perdagangan harus berupaya untuk menciptakan nilai tambah bagi pasar tradisional agar tetap menarik bagi konsumen. Ini termasuk meningkatkan kualitas produk,

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Pedagang Kerajinan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pk. 15:02 WIB

pelayanan, dan pengalaman berbelanja di pasar tradisional. Tanpa adanya strategi yang tepat, pelaku usaha di pasar tradisional akan semakin terpinggirkan.

Kendala infrastruktur juga menjadi masalah yang dihadapi Dinas Perdagangan. Banyak fasilitas di Pasar Pargarutan yang memerlukan perbaikan, seperti sanitasi, area parkir, dan aksesibilitas. Infrastruktur yang buruk dapat mengurangi kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung dan transaksi di pasar. Dinas Perdagangan perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur pasar agar dapat mendukung aktivitas perdagangan dengan lebih baik.

Dalam wawancara dengan salah satu staf Dinas Perdagangan, mereka menjelaskan tentang kendala infrastruktur yang dihadapi.

“Banyak fasilitas di Pasar Pargarutan yang memerlukan perbaikan, seperti sanitasi dan area parkir. Infrastruktur yang buruk dapat mengurangi kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha. Kami berusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tetapi sering kali prosesnya lambat,”⁴⁵

Wawancara dengan staf Dinas Perdagangan menggarisbawahi pentingnya infrastruktur yang baik untuk mendukung aktivitas perdagangan. Infrastruktur yang buruk tidak hanya mempengaruhi kenyamanan pengunjung, tetapi juga dapat mengurangi minat pelaku usaha untuk berjualan di pasar. Dinas Perdagangan perlu mempercepat proses

⁴⁵ Wawancara dengan Staf Dinas Perdagangan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pkl. 08.22 WIB

perbaikan infrastruktur dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa fasilitas pasar memenuhi standar yang diperlukan.

Selain itu, kurangnya promosi dan pemasaran produk lokal juga menjadi hambatan. Dinas Perdagangan perlu lebih aktif dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Tanpa adanya promosi yang efektif, produk lokal sulit untuk dikenal oleh masyarakat luas. Dinas Perdagangan harus merancang strategi pemasaran yang lebih agresif dan kreatif untuk menarik perhatian konsumen, baik melalui media sosial maupun kegiatan promosi langsung di pasar.

Hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya akses pelaku usaha terhadap informasi dan teknologi. Banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan usaha mereka. Dinas Perdagangan perlu memberikan pelatihan dan dukungan dalam penggunaan teknologi, seperti pemasaran online dan manajemen keuangan digital. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Bapak Joni, seorang pedagang makanan, mengungkapkan tantangan dalam hal akses informasi dan teknologi.

“Banyak dari kami yang belum memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha. Dinas Perdagangan perlu memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi, seperti pemasaran online. Jika kami tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, kami akan tertinggal,” katanya.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Joni Pedagang Makanan Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 18 Maret 2025 pk. 15:32 WIB

Wawancara dengan Bapak Joni menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan akses terhadap teknologi dapat menghambat perkembangan usaha pelaku pasar. Dinas Perdagangan perlu mengambil inisiatif untuk memberikan pelatihan dan dukungan dalam penggunaan teknologi informasi, seperti pemasaran online dan manajemen keuangan digital. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Ini juga mencerminkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman agar pelaku usaha tidak tertinggal dan dapat memanfaatkan peluang yang ada di era digital.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Dari keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi pelaku usaha, hingga tantangan dari pasar modern dan infrastruktur yang buruk, semua faktor ini mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Dinas Perdagangan perlu melakukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif, serta melibatkan pelaku usaha dalam setiap langkah pengembangan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Dinas Perdagangan juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kebijakan. Beberapa kebijakan yang ada mungkin tidak mendukung pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. Dinas Perdagangan perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan perubahan kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, pelaku usaha di Pasar Pargarutan dapat beroperasi dengan lebih nyaman dan produktif.

Kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan. Dinas Perdagangan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan sinergi dalam pemberdayaan pelaku usaha. Namun, seringkali terdapat kesulitan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara berbagai pihak. Dinas Perdagangan perlu meningkatkan upaya untuk membangun jaringan dan kerjasama yang lebih baik agar program-program pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar.

Sikap mental pelaku usaha juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan. Beberapa pelaku usaha mungkin memiliki pola pikir yang kurang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Dinas Perdagangan perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif untuk mengubah pola pikir ini, sehingga pelaku usaha mau beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dapat membantu mengubah sikap mental pelaku usaha.

Dinas Perdagangan juga harus menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan evaluasi program. Tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, sulit untuk mengetahui sejauh mana program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Dinas Perdagangan perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan evaluasi yang baik, Dinas Perdagangan dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan efektif.

Kendala dalam hal waktu juga menjadi hambatan. Banyak pelaku usaha yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk mengikuti program-program yang ditawarkan oleh Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan perlu merancang program yang fleksibel dan dapat diakses oleh pelaku usaha tanpa mengganggu aktivitas mereka. Dengan cara ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah terlibat dalam program pemberdayaan.

Secara keseluruhan, Dinas Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Selatan menghadapi berbagai hambatan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Dari keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, hingga tantangan dari pasar modern, semua faktor ini mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Dinas Perdagangan perlu melakukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif, serta melibatkan pelaku

usaha dalam setiap langkah pengembangan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan mengungkapkan dua temuan utama yang menjadi fokus pembahasan. Temuan pertama adalah peran Dinas Perdagangan yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha melalui berbagai program dan kegiatan. Temuan kedua adalah hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan tersebut. Kedua temuan ini saling terkait dan memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas pemberdayaan pelaku usaha di pasar tradisional

Peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha sangat terlihat melalui program-program yang mereka laksanakan, seperti pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan promosi produk lokal. Dinas Perdagangan berupaya untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha agar mereka dapat mengelola bisnis dengan lebih baik. Program pelatihan yang diadakan secara berkala mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan adanya pelatihan ini, pelaku usaha diharapkan dapat lebih percaya diri dan kompetitif di pasar yang semakin ketat.

Namun, meskipun peran Dinas Perdagangan sangat penting, terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Dinas Perdagangan sering kali mengalami kendala dalam hal pendanaan untuk melaksanakan program-program yang direncanakan. Anggaran yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk semua kegiatan, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan ini mengakibatkan dampak yang kurang signifikan terhadap pelaku usaha, yang seharusnya dapat merasakan manfaat dari program-program tersebut.

Hambatan lain yang dihadapi Dinas Perdagangan adalah kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui manfaat dari program-program yang ditawarkan, sehingga mereka enggan untuk terlibat. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Perdagangan untuk melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam menyampaikan informasi dan menjelaskan bagaimana program-program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha.

Kedua temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi antara Dinas Perdagangan dan pelaku usaha. Dinas Perdagangan harus lebih aktif dalam mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya partisipasi mereka dalam program-program pemberdayaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan relevan, diharapkan pelaku usaha akan

lebih termotivasi untuk terlibat dalam program-program yang ada. Ini juga mencerminkan pentingnya membangun hubungan yang baik antara Dinas Perdagangan dan pelaku usaha untuk menciptakan sinergi dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kualitas program yang dapat dilaksanakan. Program-program yang tidak didanai dengan baik cenderung tidak efektif dan tidak memberikan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah yang memiliki visi yang sama dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan diversifikasi sumber pendanaan, Dinas Perdagangan dapat lebih fleksibel dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi pelaku usaha.

Dalam konteks persaingan dengan pasar modern, kedua temuan ini menjadi semakin relevan. Pelaku usaha di Pasar Pargarutan menghadapi tantangan dari pasar modern yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Jika Dinas Perdagangan tidak dapat memberikan program yang menarik dan relevan, pelaku usaha akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Perdagangan untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan daya tarik pasar tradisional, seperti memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi konsumen.

Tugas dinas perdagangan di pasar pargarutan melalui bidang pasar adalah mengontrol dan menata pedagang dalam berjualan di pasar tsb seperti

penataan lokasi jualan kebutuhan” pokok dan kebutuhan sekunder agar tidak semrawut.

Teori pendukung dalam hasil penelitian ini adalah

1. Teori Pemberdayaan Ekonomi

Teori pemberdayaan ekonomi menekankan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha agar mampu mandiri dan berdaya saing. Menurut Thomas & Kohl (2000), pemberdayaan ekonomi meliputi peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan kebijakan yang memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Teori Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith (1776), pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha, peran dinas terkait dianggap sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan akses pasar, pelatihan, dan pendampingan usaha.

3. Teori Pemberdayaan Melalui Kebijakan Publik

Dari sudut pandang kebijakan publik, teori ini menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan pelaku usaha sangat bergantung pada peran aktif pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan (Lindberg, 2004).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan sangat signifikan melalui

program-program seperti pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan promosi produk lokal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha kecil dan menengah melalui berbagai inisiatif pemberdayaan.⁴⁷

Efektivitas program-program tersebut sering terhambat oleh berbagai hambatan. Dalam studi Anda, hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha, yang menyebabkan program tidak maksimal. Demikian pula, penelitian sebelumnya mengidentifikasi kekurangan sumber daya dan rendahnya tingkat partisipasi sebagai kendala utama dalam keberhasilan program pemberdayaan.⁴⁸

Dari segi solusi dan rekomendasi, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi dan sosialisasi dari Dinas Perdagangan agar pelaku usaha lebih memahami dan termotivasi untuk ikut serta dalam program. Hal ini juga sesuai dengan temuan penelitian terdahulu yang merekomendasikan agar pemerintah memperkuat strategi komunikasi dan meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan, Dinas Perdagangan perlu mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha. Ini memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif, serta

⁴⁷ Suryani, R. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123-135, 2018.

⁴⁸ Susanto, A., & Dewi, S. Hambatan dan Strategi Peningkatan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Program Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 45-60, 2020.

melibatkan pelaku usaha dalam setiap langkah pengembangan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian mengenai peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Pertama, keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya menjadi salah satu faktor yang signifikan. Penelitian ini mungkin tidak dapat mencakup seluruh aspek yang ada di lapangan karena waktu yang terbatas untuk melakukan pengumpulan data dan analisis. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya representatif terhadap kondisi sebenarnya di Pasar Pargarutan.

Kedua, keterbatasan dalam jumlah responden juga menjadi perhatian. Penelitian ini mungkin hanya melibatkan sejumlah kecil pelaku usaha dan staf Dinas Perdagangan, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Dengan jumlah responden yang terbatas, ada kemungkinan bahwa pandangan dan pengalaman yang diungkapkan tidak mencerminkan keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh semua pelaku usaha di pasar tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus dipahami dalam konteks keterbatasan jumlah responden yang terlibat.

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi keterbatasan. Jika penelitian ini lebih mengandalkan wawancara kualitatif tanpa dukungan data kuantitatif yang memadai, maka analisis yang dilakukan mungkin tidak cukup komprehensif. Data kualitatif dapat memberikan wawasan mendalam, tetapi tanpa data kuantitatif, sulit untuk mengukur seberapa besar dampak dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Oleh karena itu, kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif akan lebih ideal untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah bias dalam pengumpulan data. Responden mungkin memiliki pandangan subjektif yang dapat mempengaruhi jawaban mereka selama wawancara. Misalnya, pelaku usaha mungkin cenderung memberikan jawaban yang positif tentang Dinas Perdagangan karena mereka ingin mendapatkan dukungan lebih lanjut. Sebaliknya, mereka juga bisa mengungkapkan ketidakpuasan yang berlebihan jika mereka merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak objektif dan mempengaruhi validitas temuan.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan, Dinas Perdagangan perlu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. Upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki komunikasi dengan pelaku usaha, serta mencari sumber pendanaan alternatif sangat penting untuk

memastikan keberhasilan program-program pemberdayaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Dinas Perdagangan dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dua rumusan masalah dan temuan hasil yang telah dibahas, yaitu peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan. Melalui berbagai program yang dilaksanakan, seperti pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan promosi produk lokal, Dinas Perdagangan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha. Program-program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.
2. Meskipun peran Dinas Perdagangan sangat penting, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas program-program pemberdayaan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama yang mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha juga menjadi tantangan yang signifikan, di mana banyak pelaku usaha yang tidak

mengetahui manfaat dari program-program yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan sosialisasi dari Dinas Perdagangan untuk mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam program-program tersebut.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil penelitian:

1. Dinas Perdagangan perlu berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk program-program pemberdayaan pelaku usaha. Dengan anggaran yang lebih memadai, Dinas Perdagangan dapat melaksanakan lebih banyak kegiatan, seperti pelatihan, promosi, dan pengembangan infrastruktur pasar. Selain itu, Dinas Perdagangan juga dapat mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah yang memiliki visi yang sama.
2. Dinas Perdagangan harus melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam mengedukasi pelaku usaha tentang manfaat program-program yang ditawarkan. Melalui seminar, workshop, dan media sosial, Dinas Perdagangan dapat menyampaikan informasi yang jelas dan relevan mengenai program-program pemberdayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program tersebut.

3. Untuk meningkatkan daya tarik Pasar Pargarutan, Dinas Perdagangan perlu fokus pada pengembangan infrastruktur yang memadai. Perbaikan fasilitas seperti sanitasi, area parkir, dan aksesibilitas akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengunjung dan pelaku usaha. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk merealisasikan perbaikan infrastruktur ini.
4. Dinas Perdagangan perlu memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang penggunaan teknologi informasi, seperti pemasaran online dan manajemen keuangan digital. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dinas Perdagangan juga dapat memfasilitasi platform online untuk mempromosikan produk lokal, sehingga pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak konsumen.
5. Dinas Perdagangan harus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak dari program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Dinas Perdagangan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program yang ada, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Melibatkan pelaku usaha dalam proses evaluasi juga dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan harapan mereka, sehingga program yang dijalankan dapat lebih relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Nasser Hasibuan.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Amalia, L. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: University Press.

Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Assa, A., P., G., dkk. (2021). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Governance*, 1 (2).

Aziz, M., A., dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakir, R., S. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.

Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handini, S., Sukesi & Astuti, H., K. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Jakad Publishing.

Hardani. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hasibuan A, N., Ramadhan, A, dan Matondang, Z, (2022), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Pada Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk (Tahun 2011-2021), *Jurnal Profjes*, Volume 01.

Hasibuan A, N., Ramadhan, A, dan Matondang, Z, (2022), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Pada Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk (Tahun 2011-2021), *Jurnal Profjes*, Volume 01.

Hasibuan, A, N, Hanggarani, Y, Nasution, J, (2022), Persepsi Dan Sikap Pengunjung Terhadap Pengembangan Kawasan Pantai Natal Sebagai Wisata Halal Di Kabupaten Mandailing Natal, *Jurnal Profjes*, Volume 01, Edisi 01.

- Kartasmita, G. (2006). *Pengembangan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Grasindo.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah.
- Kristanto. (2009). *Kewirausahaan Entrepreneur Pendekatan Manajemen dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L., J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muddasir. (2023). "Peran Dinas Perdagangan Dalam Penanganan Operasional Pasar Sapi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.
- Mulyadi, M. (2012). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Publica Institute.
- Nofianti, dkk. (2019). "Peran Dinas Perdagangan Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (1).
- Putra, C., A., P., dkk. (2019). "Peran Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (1).
- Ramadhan, G. (2022). "Peran Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Memberdayakan UMKM Pada Masa Covid 19". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rizal, H., A., dkk. (2021). "Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM". *Jurnal KINERJA*, 18 (4).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, T., T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Tambunan, T., T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T., T. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala dan Tantangan*. Bogor: Toha Putra.
- Tanjung, M., A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang. (2019). *KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pustaka Indo.
- Wawancara dengan Bapak Burhan, Selaku Pedagang di Pasar Pargarutan, Pada Tanggal 15 September 2024.
- Wawancara dengan Ibu Riska, Selaku Pedagang di Pasar Pargarutan, Pada Tanggal 15 September 2024.
- Wawancara dengan Ibu Riska, Selaku Pedagang di Pasar Pargarutan, Pada Tanggal 15 September 2024.
- Widjono. (2007). *Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Woga, S. (2022). "Peran Dinas Perdagangan Kota Malang Terhadap Penataan Pasar Tradisional (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian Studi di Pasar Mergan Kecamatan Klojen, Kota Malang)". *Skripsi*. Universitas Merdeka Malang.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Asmar Tanjung
Tempat/ Tanggal Lahir : Panyabungan II, 20 September 2001
NIM : 1940200055
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Darussalam, Panyabungan
Nomor Handphone/ WA : 081396970443
Nama Ayah : M.Dalkit Tanjung
Nama Ibu : Siti Kholidah
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara
Motto Hidup : Jangan takut untuk mencoba karena tanpa mencoba tidak akan tau hasilnya

Pendidikan

SD Negeri 078 Panyabungan : Tamat Tahun 2013
MTs MI Panyabungan : Tamat Tahun 2016
SMA Negeri 1 Panyabungan : Tamat Tahun 2019

Lampiran

KUESIONER PENELITIAN PERANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DI PASAR PARGARUTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Untuk Pedagang Pasar

1. Bagaimana bapak melihat peran Dinas Perdagangan dalam membantu pedagang di Pasar Pargarutan? Apa contoh nyata dukungan atau bantuan yang bapak terima?
2. Dalam pemberdayaan usaha, program atau inisiatif apa yang menurut bapak/ibu paling bermanfaat bagi pelaku usaha di pasar ini?
3. Apakah ada aspek tertentu dari pemberdayaan yang dirasakan kurang memadai oleh Dinas Perdagangan?
4. Bagaimana hubungan komunikasi bapak/ibu dengan Dinas Perdagangan? Apakah mereka mendengarkan masukan dari pedagang?
5. Apa tantangan atau kesulitan yang bapak/ibu hadapi dalam menjalankan usaha, dan sejauh mana bapak/ibu merasa Dinas Perdagangan sangat mendukung dalam mengatasi masalah ini?

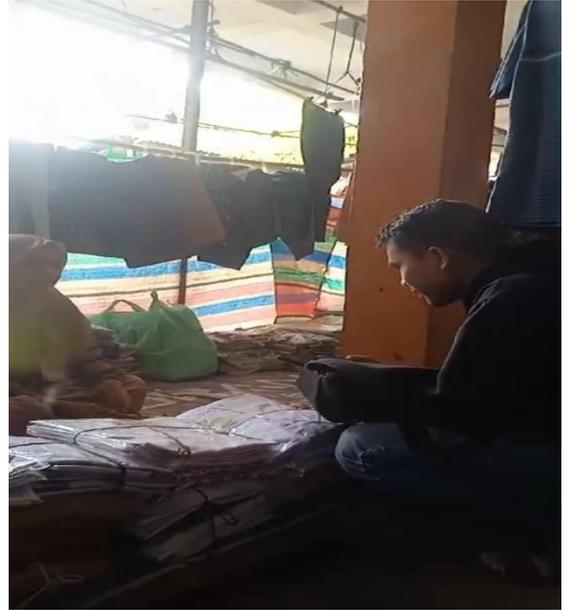
Untuk Dinas Perdagangan

1. Bagaimana Dinas Perdagangan melaksanakan perannya dalam pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Pargarutan? Apa program utama yang saat ini dijalankan?
2. Dalam pandangan bapak/ibu, apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam pemberdayaan pelaku usaha di pasar ini?
3. Apa saja tantangan atau hambatan yang sering dihadapi Dinas Perdagangan dalam menjalankan program pemberdayaan ini? Dapatkah bapak/ibu memberikan contoh-contoh konkret?
4. Bagaimana Dinas Perdagangan berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Apakah ada strategi khusus yang diterapkan?
5. Bagaimana bapak/ibu melibatkan para pedagang dalam proses pengambilan

keputusan terkait program pemberdayaan? Apakah ada saluran bagi mereka untuk menyampaikan pendapat atau saran?

Lampiran Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 567 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/02/2025 25 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Selatan.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ali Wardani
NIM : 1940200203
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Peranan Dinas Pasar Dalam Pemberdayaan Usaha di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIM 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok Kode Pos 22742

Telp. () Faks. ()
E-mail : disdagkop.tapselkab@gmail.com Website : www.disdagkop.tapselkab.go.id

Sipirok, 18 Maret 2025

Nomor : 400.3/323/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Riset

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di -

Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor: 567/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/02/2025 Tanggal 25 Februari 2025 perihal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan memberikan **Izin Riset** pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada:

Nama : Ali Wardana
NIM : 1940200203
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Daerah Kab. Tapsel



Novita Sari Wahyuni, S.AP,M.Si
NIP. 198411112003122004